

Tinjauan Mata Kuliah

Substansi pembahasan dalam mata kuliah “Implementasi Kebijakan Publik” adalah mempelajari dan mendiskusikan konsep implementasi kebijakan, praktik, strategi, dan inovasi dalam implementasi kebijakan dalam konteks tata kelola pemerintahan (*governance*) dalam birokrasi publik. Implementasi kebijakan merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji berbagai aspek yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi keberhasilan kebijakan yang ditetapkan. Dalam perspektif administrasi publik, eksistensi implementasi kebijakan merupakan bidang kajian ilmu yang memiliki kompleksitas tersendiri. Pada umumnya, administrasi publik menempatkan implementasi kebijakan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan administrasi publik. Keberhasilan administrasi publik sangat ditentukan oleh efektivitas keberhasilan implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kapasitas pelaku kebijakan sebagai ujung tombak kebijakan dipandang sebagai aspek yang esensial dalam mendukung keberhasilan birokrasi publik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan publik merupakan salah satu dimensi yang paling urgen dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.

Tujuan utama penulisan modul ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa Universitas Terbuka yang berkaitan dengan konsep dan teori implementasi kebijakan dalam birokrasi pemerintahan agar mengetahui, memahami, dan mempraktikkan konsep dan teori implementasi kebijakan dalam tataran praktis. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi kebijakan publik. Dalam pembahasan mata kuliah “Implementasi Kebijakan Publik” dalam buku ini terbagi menjadi sembilan modul, masing-masing bab terdiri atas dua kegiatan belajar (Kegiatan Belajar 1 dan Kegiatan Belajar 2) yang disusun untuk dapat mencapai tujuan (kompetensi umum) yang telah ditetapkan. Dalam mata kuliah ini, beberapa subpokok bahasan yang menjadi topik pembahasan yang diselesaikan selama dua kali tatap muka. Uraian setiap modul sebagai berikut.

Modul 1 membahas trajektori implementasi kebijakan, konsep dan definisi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*governance*) yang bersumber dari paradigma administrasi publik yang mutakhir, yaitu perspektif *new public governance* (NPG) (Osborne, 2010). Dalam literatur implementasi kebijakan terdapat beragam definisi tentang implementasi kebijakan. Definisi yang digunakan para ahli kebijakan publik dan peneliti kebijakan tentang implementasi kebijakan mengadopsi definisi Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pemerintah dan telah disahkan oleh lembaga hukum yang berwenang dalam menetapkan kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan bertujuan mengatasi masalah yang dihadapi, mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan strategi yang tepat dan terukur. Dalam proses implementasi kebijakan,

pada umumnya melalui proses atau langkah-langkah yang dimulai dengan menetapkan permasalahan berdasarkan kondisi faktual yang dihadapi dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang memiliki kewenangan (*power*) bersama-sama dengan lembaga dan kelompok target yang menjadi objek tujuan kebijakan (masyarakat) sebagai sasaran akhir kebijakan sehingga akan menghasilkan perubahan nyata dari kebijakan yang diimplementasikan, apakah bersifat yang diinginkan atau tidak diinginkan atau dampak yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah atau lembaga yang berwenang), dan bermuara pada perubahan sikap dan perilaku, hasil, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan yang diimplementasikan.

Definisi Mazmanian dan Sabatier tersebut bersumber dari pemikiran Pressman dan Wildavsky (1973) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah kesepakatan bersama oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dan kebijakan yang diimplementasikan telah memenuhi prasyarat awal (*initial condition*) sebagai hipotesis yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan bersifat kompleks sehingga memerlukan tindakan yang sistematis, terukur, dan akademik sehingga kebijakan yang diimplementasikan efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah publik atau sosial. Modul 1 adalah pendahuluan yang membahas sejarah implementasi kebijakan yang dibagi menjadi dua subpokok bahasan, yaitu (1) trajektori perkembangan implementasi kebijakan dan studi implementasi kebijakan, serta (2) kerangka konsep dan definisi implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik. Kata kunci pada Modul 1 adalah sejarah tentang disiplin ilmu implementasi kebijakan (P. Sabatier & Mazmanian, 1980) dan konsep serta definisi implementasi kebijakan (Datnow & Park, 2009; Van Meter & Van Horn, 1975).

Selanjutnya, Modul 2 membahas teori implementasi kebijakan dan determinan implementasi kebijakan publik (Hill & Hupe, 2002) yang mencakup dua pokok bahasan: (1) teori implementasi kebijakan publik dan (2) determinasi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik. Studi implementasi kebijakan publik dalam administrasi publik merupakan proses menganalisis dan menjelaskan peran kebijakan publik (DeGroff & Cargo, 2009; Hupe et al., 2014; Jensen et al., 2018; Kotnik et al., 2020).

Modul 3 membahas pendekatan implementasi kebijakan publik yang meliputi dua subpokok bahasan, yaitu (1) pendekatan *top-down* dan *bottom-up* implementasi kebijakan publik, serta (2) pendekatan sintesis dan jaringan (*networks*). Modul 3 membahas pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan (P. A. Sabatier, 1986), dalam literatur pendekatan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan (Coates, 1979; deLeon & deLeon, 2002). Untuk kegiatan belajar selanjutnya membahas pendekatan sintesis (*synthesize approach*) dalam implementasi kebijakan (Jensen et al., 2018; Matland, 1995; Russell, 2015), dan membahas pendekatan jaringan dalam implementasi kebijakan (*policy implementation networks*) (E. H. Klijn & Koppenjan, 2016, 2000; E.H. Klijn, 2008).

Modul 4 membahas hubungan *politics of policy implementation* (Diem, 2017; Grindle, 2017; Liang, 2016; Werts & Brewer, 2014). Modul 4 membahas hubungan administrasi publik dengan studi implementasi kebijakan publik dan proses implementasi kebijakan publik yang terdiri atas dua subpokok bahasan, yaitu (1) perspektif implementasi kebijakan dalam administrasi publik dan (2) penelitian tentang implementasi kebijakan dalam paradigma administrasi publik. Kemudian Kegiatan Belajar 2 mendiskusikan proses implementasi kebijakan publik (Klijn & Koppenjan, 2000) dan pendekatan tata kelola pemerintahan baru *new public governance* (Osborne, 2010) dalam implementasi kebijakan.

Modul 5 membahas analisis implementasi kebijakan dan evaluasi implementasi kebijakan meliputi dua pokok bahasan, yaitu (1) strategi implementasi kebijakan publik dan (2) monitoring, serta evaluasi implementasi kebijakan publik analisis kebijakan dan implementasi (Bardach, 2012; Patton et al., 2016). Modul 10 membahas fokus kajian tentang model implementasi kebijakan dan evaluasi (Anderson, 2003, 2015).

Modul 6 membahas implementasi kebijakan: perspektif *policy networks* dan manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan publik yang meliputi dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 membahas jaringan implementasi kebijakan *networks* (Bfunkerhoff, 1996; DeGroff & Cargo, 2009; E. H. Klijn & Koppenjan, 2016). Kemudian Kegiatan Belajar 2 membahas analisis kebijakan dan implementasi (Anderson, 2003, 2015; Dunn 2010).

Selanjutnya, Modul 7 membahas hubungan jaringan manajerial terhadap implementasi kebijakan: perspektif *new public governance* dan *governance networks*. Modul ini terbagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu (1) Kegiatan Belajar 1 mencakup pembahasan bahan ajar jaringan manajerial dan pendekatan NPG. (2) Kegiatan Belajar 2 adalah membahas tentang perspektif *governance networks* dalam implementasi kebijakan. Perspektif implementasi kebijakan (Bhatta, 2014; Grindle, 2017; Khan, 2018; Osborne, 2010), dan *game theory* dalam implementasi kebijakan (Owen, 2012).

Modul 8 membahas implementasi inovasi kebijakan publik dan pengembangan kapasitas dalam implementasi kebijakan publik. Modul ini terbagi menjadi dua bagian kegiatan belajar. (1) Kegiatan Belajar 1 membahas implementasi inovasi kebijakan publik dan pengembangan kapasitas dalam implementasi kebijakan publik. (2) Kegiatan Belajar 2 dalam Modul 8 berkaitan erat dengan tantangan organisasi publik dalam implementasi kebijakan, kapasitas implementasi kebijakan (Borrás, 2011; Christensen et al., 2019; Howlett, 2015). Selanjutnya, membahas materi pokok inovasi kebijakan dan implementasi kebijakan dalam organisasi publik (Boardman et al., 2020; Provan & Kenis, 2007; Whetsell et al., 2020) serta efektivitas implementasi kebijakan publik (Heink et al., 2015; Lilja, 2020; Pradhan et al., 2017; Veiga & Amaral, 2009).

Pada bagian akhir buku ini, yaitu Modul 9 sebagai bagian penutup meliputi dua pokok bahasan, yaitu (1) implementasi kebijakan publik dalam perspektif *collaborative governance*; (2) implementasi kebijakan publik perspektif *collaborative advantage*. Modul ini berisi dua kegiatan belajar, yaitu Kegiatan Belajar 1 membahas implementasi kebijakan publik berdasarkan perspektif *collaborative governance* (Ansell et al., 2017;

Arora et al., 2016; Fischer et al., 2006; Vernon et al., 2005). Kegiatan Belajar 2 sebagai pembahasan terakhir dalam modul ini, yaitu menguraikan implementasi kebijakan publik dalam perspektif *collaborative advantage* (Lavee et al., 2018; May & Winter, 2009; Miller, 2010; Moore, 1987; Zhan et al., 2014).

Peta Kompetensi Implementasi Kebijakan Publik/FSAP4202/3 SKS

